

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,  
DANA ALOKASI KHUSUS, DAN DANA BAGI HASIL PADA  
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA**

**Gede Ferdi Williantara<sup>1</sup>  
I Gusti Ayu Nyoman Budiasih<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia  
e-mail: ferdi\_williantara@yahoo.com/ telp: +62 89 896 065 06

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini menggunakan sampling jenuh, dengan total sampel sebanyak 45 amatan. Data yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Belanja Modal (BM), dan Indeks Pembangunan Manusia yang berasal dari laporan realisasi APBD dan Tabel Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2009-2013. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil tidak mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan PAD, DAU, dan DBH dalam membiayai Belanja Modal tidak mempengaruhi capaian IPM. Namun Dana Alokasi Khusus menunjukkan hasil yang berpengaruh negatif pada IPM. Hal tersebut mengindikasikan semakin besar DAK dalam membiayai Belanja Modal maka akan dapat menurunkan capaian IPM.

**Kata kunci:** Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Indeks Pembangunan Manusia

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the influence of local revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), and Revenue Sharing Fund (DBH) on the Human Development Index (HDI). This study uses a sampling saturated, with a total sample of 45 observations. The data used is Local Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, Capital Expenditure, and the Human Development Index which is derived from the realization of the budget and the report's Human Development Index Table Regency / City in the province of Bali in 2009- 2013. This study uses multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that the PAD, DAU, and DBH don't affect the Human Development Index. This indicates that the ability of PAD, DAU and DBH finance capital expenditures does not affect the achievements of IPM. However, the Special Allocation Fund showed a negative effect on the results of the IPM. This indicates that the greater the DAK in financing the capital expenditure will be able to lower the HDI achievement.*

**Keywords:** Local Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, Human Development Index

## **PENDAHULUAN**

Sejak dirubahnya sistem pemerintahan di Indonesia yang pada awalnya menganut sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi atau dikenal dengan sebutan otonomi daerah pada tahun 2001, pemerintah daerah memiliki wewenang dalam mengatur rumah tangganya sendiri dengan meminimalkan intervensi dari pemerintah pusat. Kebijakan otonomi daerah di Indonesia diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Otonomi daerah dipandang lebih demokratis dan mencerminkan desentralisasi yang sesungguhnya karena masing-masing daerah dapat lebih leluasa menggali potensi-potensi yang ada di daerahnya (Wertianti, 2013). Sistem otonomi daerah juga diharapkan dapat mempercepat laju pembangunan daerah.

Bali sebagai salah satu provinsi di Indonesia telah merasakan dampak dari diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, khususnya dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD tersusun dari komponen penerimaan daerah dan belanja daerah. Pengalokasian anggaran belanja ke dalam pos yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan akan memicu pertumbuhan yang positif pada kesejahteraan masyarakat (Zebua, 2014).

Alokasi belanja daerah seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun dalam penyusunannya sering bercampur dengan kepentingan

politis antara pihak eksekutif dan legislatif yang mengakibatkan kurang efektifnya belanja modal. Belakangan ini terdapat penurunan alokasi belanja modal untuk pembangunan daerah dan sebaliknya terjadi peningkatan proporsi belanja pegawai yang tidak berpengaruh langsung pada pembangunan daerah, hal tersebut menunjukkan belum efektifnya alokasi belanja daerah.

Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004, dalam pelaksanaan otonomi daerah pemerintah daerah memiliki sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah yang terdiri atas: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), 2) Dana Perimbangan, 3) Pinjaman Daerah, 4) Lain-lain penerimaan yang sah. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Provinsi Bali yang terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota merupakan daerah yang kaya akan budaya dan adat istiadat sehingga sektor pariwisata dapat berkembang secara pesat. Dengan daya tariknya tersebut Provinsi Bali mendapatkan Pendapatan Asli Daerah cenderung besar serta kontribusinya terus mengalami kenaikan dan akan mempengaruhi penerimaan daerah yang diharapkan menjadi sumber pembiayaan untuk memperbaiki pelayanan terhadap masyarakat sehingga pembangunan manusia dan daerah di Provinsi Bali dapat berkembang. Salah satu indikator pembangunan yaitu Indeks Pembangunan Manusia akan mengalami peningkatan yakni melalui kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, infrastuktur, serta pendidikan. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Data yang berkaitan dengan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dari tahun 2009-2013 disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1.**  
**Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun Anggaran 2009-2013 (Dalam Miliar Rupiah)**

Kabupaten/ Kota	2009	2010	2011	2012	2013
Buleleng	63,485	86,962	109,167	129,003	160,384
Jembrana	23,324	34,380	41,330	46,470	68,485
Tabanan	93,444	116,860	141,046	183,295	255,418
Badung	850,170	979,194	1.406,298	1.872,346	2.279,113
Gianyar	112,540	153,559	209,598	261,222	319,612
Bangli	16,301	16,252	22,963	40,751	56,661
Klungkung	29,566	31,331	40,735	48,561	67,401
Karangasem	47,842	62,696	129,556	144,019	168,652
Denpasar	215,156	260,482	424,959	511,326	658,974

*Sumber:* Biro Keuangan Setda Provinsi Bali, 2015

Berdasarkan Tabel 1 PAD tertinggi diperoleh Kabupaten Badung yaitu sebesar Rp. 2.279.110.000.000,00 pada tahun 2013 dan posisi kedua dengan PAD tertinggi diperoleh Kota Denpasar yaitu sebesar Rp. 658.974.707.435,78 pada tahun 2013, sedangkan PAD terendah diperoleh Kabupaten Bangli yaitu sebesar Rp. 16.301.547.341,74 pada tahun 2009. PAD seluruh daerah di Provinsi Bali mengalami peningkatan setiap tahunnya, seharusnya diimbangi dengan peningkatan capaian IPM karena daerah mengalokasikan belanja daerahnya untuk menaikkan sektor-sektor yang mendukung peningkatan capaian IPM.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara

pemerintah dan pemerintahan daerah dan antar pemerintah pusat. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil.

Kemampuan tiap daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya masing-masing tidak sama, hal tersebut menyebabkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Upaya pemerintah guna menanggulangi ketimpangan fiskal adalah dengan cara pengalokasian dana yang tepat yang bersumber dari APBN untuk membiayai keperluan daerah demi menunjang pembangunan daerah dalam rangka otonomi daerah. Dana Alokasi Umum merupakan salah satu dari dana perimbangan yang dialokasikan oleh pemerintah, yaitu dana yang berasal dari APBN yang bertujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhannya dalam rangka desentralisasi. Penggunaan DAU diharapkan untuk keperluan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Data yang berkaitan dengan DAU Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dari tahun 2009-2013 disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2.**  
**Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun Anggaran 2009-2013 (Dalam Miliar Rupiah)**

Kabupaten/ Kota	2009	2010	2011	2012	2013
Buleleng	506,292	512,748	568,131	687,697	796,419
Jembrana	306,361	308,567	339,501	396,762	450,919
Tabanan	424,281	429,919	463,073	574,346	663,156
Badung	280,987	131,919	157,052	353,067	372,625
Gianyar	405,118	387,493	434,899	532,883	609,293
Bangli	276,000	292,695	321,381	396,942	450,812
Klungkung	278,553	285,662	319,611	387,340	444,174
Karangasem	356,681	374,537	409,812	503,028	563,981
Denpasar	360,011	336,125	381,372	512,660	580,807

Sumber: Biro Keuangan Setda Provinsi Bali, 2015

Berdasarkan Tabel 2 DAU tertinggi diperoleh Kabupaten Buleleng yaitu sebesar Rp. 796.419.224.000,00 pada tahun 2013 dan posisi kedua dengan DAU tertinggi diperoleh Kabupaten Tabanan yaitu sebesar Rp. 663.156.595.000,00 pada tahun 2013, sedangkan DAU terendah diperoleh Kabupaten Badung yaitu sebesar Rp. 131.919.568.000,00 pada tahun 2009. Pengalokasian DAU tertinggi pada Kabupaten Buleleng disebabkan karena kapasitas fiskalnya rendah sementara kebutuhan fiskalnya relatif besar. Sejalan dengan alokasi DAU Kabupaten Badung yang memperoleh DAU terendah disebabkan oleh kapasitas fiskalnya tinggi cukup untuk memenuhi kebutuhan fiskalnya.

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Penggunaan DAK merupakan kewenangan dari pemerintah daerah karena DAK adalah bagian dari APBD, supaya penggunaan DAK pemerintah daerah sejalan dengan kepentingan nasional maka penggunaan DAK diatur melalui berbagai aturan yang diatur oleh pemerintah pusat. Setelah diberlakukannya sistem desentralisasi pada tahun 2001 maka lingkup kegiatan yang dibiayai DAK semakin bertambah yang mencakup tujuh bidang pelayananan pemerintah, yaitu: 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Pertanian, 4) Pekerjaan Umum (jalan, irigasi, dan air bersih), 5) Prasarana Pemerintahan, 6) Kelautan dan Perikanan, dan 7) lingkungan hidup. Pengalokasian DAK melalui Belanja Modal secara langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Jika DAK digunakan dengan bijak, maka akan berdampak pada

peningkatan mutu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur penunjang perekonomian masyarakat. Data yang berkaitan dengan DAK Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dari tahun 2009-2013 disajikan pada Tabel 3.

**Tabel 3.**  
**Dana Alokasi Khusus Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun Anggaran 2009-2013 (Dalam Miliar Rupiah)**

Kabupaten/ Kota	2009	2010	2011	2012	2013
Buleleng	50,231	65,768	54,719	62,589	67,312
Jembrana	51,898	34,720	35,488	40,170	45,403
Tabanan	56,388	47,642	41,516	47,366	48,921
Badung	41,648	3,616	0,218	1,838	0,560
Gianyar	59,614	43,762	41,069	35,930	45,158
Bangli	45,611	29,437	29,345	38,259	38,687
Klungkung	51,216	29,499	22,410	24,821	32,783
Karangasem	56,708	56,334	41,729	46,764	51,209
Denpasar	34,918	14,435	3,556	8,489	8,093

*Sumber:* Biro Keuangan Setda Provinsi Bali, 2015

Berdasarkan Tabel 3 DAK tertinggi diperoleh Kabupaten Buleleng yaitu sebesar Rp. 67.312.020.000,00 pada tahun 2013 dan posisi kedua dengan DAK tertinggi diperoleh Kabupaten Gianyar yaitu sebesar Rp. 59.614.000.000,00 pada tahun 2009, sedangkan DAK terendah diperoleh Kabupaten Badung yaitu sebesar Rp. 218.175.000,00 pada tahun 2011. DAK dialokasikan kepada tiap-tiap daerah untuk membiayai kegiatan khusus dan termasuk dalam program prioritas nasional. Kabupaten Buleleng dan Gianyar memperoleh alokasi DAK tertinggi karena Kabupaten Buleleng dan Gianyar merupakan kabupaten yang berkembang pembangunannya setelah Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, sedangkan Kabupaten Badung mendapatkan alokasi DAK terendah karena Kabupaten Badung

sendiri merupakan kabupaten yang pembangunannya cukup pesat sehingga mendapatkan PAD yang tertinggi.

Dana Bagi Hasil merupakan dana yang dialokasikan kepada tiap-tiap daerah berdasarkan presentase yang bersumber dari APBN. DBH dialokasikan untuk membiayai keperluan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. DBH digunakan demi menanggulangi ketimpangan fiskal vertikal. DBH memiliki potensi yang cukup tinggi terhadap pendapatan suatu daerah sehingga dapat membiayai belanja daerah dengan baik yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Data yang berkaitan dengan DBH Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dari tahun 2009-2013 disajikan pada Tabel 4.

**Tabel 4.**  
**Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun Anggaran 2009-2013**  
**(Dalam Miliar Rupiah)**

Kabupaten/ Kota	2009	2010	2011	2012	2013
Buleleng	35,614	44,659	37,735	43,254	38,791
Jembrana	26,594	28,610	21,668	27,391	21,511
Tabanan	32,360	36,121	29,814	34,787	22,499
Badung	135,218	186,560	123,435	160,747	55,821
Gianyar	28,590	37,010	29,202	35,584	36,365
Bangli	20,817	23,796	21,634	24,211	22,687
Klungkung	17,297	19,309	16,878	19,970	19,328
Karangasem	25,131	29,539	26,742	28,662	29,001
Denpasar	127,566	148,634	106,085	134,193	72,201

*Sumber:* Biro Keuangan Setda Provinsi Bali, 2015

Berdasarkan Tabel 4 DBH tertinggi diperoleh Kabupaten Badung yaitu sebesar Rp. 186.560.094.466,00 pada tahun 2010 dan posisi kedua dengan DBH tertinggi diperoleh Kota Denpasar yaitu sebesar Rp. 148.634.014.820,00 pada tahun 2010, sedangkan DBH terendah diperoleh Kabupaten Klungkung yaitu sebesar Rp.

17.297.507.524,00 pada tahun 2009. Pengalokasian DBH ini sesuai dengan PAD yang diperoleh masing-masing daerah dimana PAD tertinggi yaitu Kabupaten Badung yang diikuti dengan Kota Denpasar, namun dalam pengalokasian DBH terendah yaitu Kabupaten Klungkung berbeda dengan PAD terendah yang diperoleh Kabupaten Bangli.

Salah satu cara untuk mengukur tingkat kesejahteraan adalah melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan sehat (kesehatan), pengetahuan (pendidikan), dan kehidupan yang layak (ekonomi). Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Data yang berkaitan dengan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dari tahun 2009-2013 disajikan pada Tabel 5.

**Tabel 5.**  
**Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2009-2013**

<b>Kabupaten/ Kota</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Rata-rata Kab/Kota</b>
Buleleng	70,26	70,69	71,12	71,93	72,54	<b>71,31</b>
Jembrana	72,45	72,69	73,18	73,62	74,29	<b>73,25</b>
Tabanan	74,26	74,57	75,24	75,55	76,19	<b>75,16</b>
Badung	74,49	72,02	75,35	75,69	76,37	<b>74,78</b>
Gianyar	72,43	72,73	73,43	74,49	75,02	<b>73,62</b>
Bangli	70,21	70,71	71,42	70,80	72,28	<b>71,08</b>
Klungkung	70,19	70,54	71,02	71,76	72,25	<b>71,15</b>
Karangasem	66,06	66,43	67,07	67,83	68,47	<b>67,17</b>
Denpasar	77,56	77,94	78,31	78,80	79,41	<b>78,40</b>
<b>Rata-rata IPM Prov. Bali</b>	<b>71,99</b>	<b>72,04</b>	<b>72,90</b>	<b>73,39</b>	<b>74,09</b>	

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2015

Berdasarkan Tabel 5 terdapat penurunan IPM yang sangat drastis pada Kabupaten Badung dari tahun 2009 ke 2010 yaitu minus 2,47 dari 74,49 menjadi 72,02. IPM tertinggi diperoleh Kota Denpasar yaitu sebesar 79,41 pada tahun 2013, sedangkan IPM terendah diperoleh Kabupaten Karangasem yaitu sebesar 66,06 pada tahun 2009. IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori capaian IPM yaitu IPM tinggi dengan kisaran 70-80 yang diperoleh seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali kecuali Kabupaten Karangasem yang diklasifikasikan IPM sedang dengan kisaran 60-70. Rata-rata Kabupaten/Kota di Provinsi Bali mengalami peningkatan IPM setiap tahunnya dalam kurun waktu 2009-2013, namun belum ada satupun perolehan IPM Kabupaten/Kota lebih dari 80 tetapi Kota Denpasar dengan capaian IPM tertinggi sudah mendekati angka tersebut.

Apabila capaian IPM yang diperoleh suatu daerah lebih dari 80 maka dapat dikatakan IPM daerah tersebut dapat diklasifikasikan sangat tinggi.

Lugastoro (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa rasio Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota di Jawa Timur dimana semakin besar kemampuan PAD dan DAK dalam membiayai belanja modal akan dapat meningkatkan IPM, sedangkan rasio Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia sehingga semakin besar kemampuan DAU dalam membiayai belanja modal maka akan menurunkan IPM, serta rasio Dana Bagi Hasil terhadap belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap IPM namun tidak signifikan yang artinya semakin besar DBH membiayai belanja modal akan meningkatkan IPM namun tidak signifikan. Sejalan dengan penelitian Irwanti (2014) menunjukkan DAU dan DAK berpengaruh positif terhadap IPM namun terdapat perbedaan hasil penelitian dalam DBH dimana dalam penelitian ini DBH dikatakan tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Ardiansyah dkk. (2014) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan, sedangkan DAU berpengaruh negatif tidak signifikan dan DAK berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyowati dan Yohana (2012) dimana sama-sama meneliti pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan PAD, DAU, DAK berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Penelitian terdahulu masih menunjukkan adanya perbedaan hasil penelitian tentang hubungan PAD, DAU, DAK, dan DBH pada IPM. Berdasarkan uraian tersebut peneliti merasa perlu untuk meneliti kembali pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH pada IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Perbedaan penelitian ini dengan riset-riset sebelumnya adalah menggunakan seluruh komponen Dana Perimbangan yang terdiri atas DAU, DAK, dan DBH serta PAD dari tahun 2009-2013 agar lebih menggambarkan pengaruh Desentralisasi Fiskal secara keseluruhan pada IPM. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, Sedangkan pada penelitian Ardiansyah dkk. (2014), Setyowati dan Yohana (2012) sama-sama meneliti pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya pada penelitian Lugastro (2013) meneliti pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur serta Irwanti (2014) meneliti pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH pada IPM melalui pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Belanja Modal digunakan sebagai alat untuk memprediksi IPM karena Belanja Modal menggambarkan pengaruh dari kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat terbukti dari IPM yang terus meningkat melalui pengalokasian Belanja Modal (Setyowati dan Yohana, 2012). Menurut Mardiasmo (2002) pelayanan publik harus sangat diperhatikan oleh pemerintah daerah. Sejalan dengan peningkatan pelayanan melalui alokasi Belanja Modal maka dapat meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Manusia dalam

peranannya merupakan subjek dan objek pembangunan yang berarti manusia selain sebagai pelaku dari pembangunan juga merupakan sasaran pembangunan. Sarana dan prasarana publik dapat mendorong peran manusia dalam pembangunan sehingga terciptanya sumber daya manusia yang produktif.

Tiap-tiap daerah diberikan wewenang dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sehingga terwujudnya kemandirian daerah yang merupakan tujuan dari desentralisasi. Semakin tinggi kemampuan suatu daerah dalam menggali potensi ekonomi menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi, maka daerah tersebut dikatakan mampu untuk menyediakan pendanaan daerah yang akan mempengaruhi pembangunan daerah (Darwanto dan Yustikasari, 2007).

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang paling berkontribusi demi menunjang kemampuan daerah dalam rangka desentralisasi. Hal ini mengindikasikan tiap-tiap daerah harus menggali potensi daerahnya masing-masing, karena ukuran keberhasilan dari desentralisasi adalah seberapa besar ketergantungan daerah pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah bebas menggunakan PAD dalam rangka membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Wijaya, 2007). Pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap kenaikan pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak secara langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada daerah tersebut (BAPPENAS, 2003). Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah dkk. (2014) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap IPM. Lugastro (2013) menyatakan bahwa

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap IPM. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis penelitian yang dihasilkan adalah sebagai berikut.

H<sub>1</sub>: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif pada Indeks Pembangunan Manusia

Pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan daerahnya memiliki kemampuan yang berbeda-beda yang menyebabkan adanya ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi ketimpangan fiskal adalah dengan cara pengalokasian dana yang bersumber dari APBN oleh pemerintah yang digunakan untuk membiayai kegiatan daerah dalam rangka otonomi. DAU merupakan salah satu komponen dari dana perimbangan dimana dalam pengalokasiannya mengutamakan keadilan dan pemerataan yang sejalan pada kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah (UU No. 32 Tahun 2004).

DAU seharusnya digunakan untuk membiayai belanja langsung, yaitu belanja yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat sejalan dengan tuntutan dari desentralisasi (Darwanto dan Yustikasari, 2007). Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Irwanti (2014) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Setyowati dan Yohana (2012) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis penelitian yang dihasilkan adalah sebagai berikut.

H<sub>2</sub>: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif pada Indeks Pembangunan Manusia

Hubungan antara perimbangan keuangan pusat dengan daerah, Dana Alokasi Khusus hanya mempunyai fungsi sebagai pelengkap dari jenis dana perimbangan lainnya. Namun dewasa ini peran Dana Alokasi Khusus sangat penting dalam pembangunan daerah. Pemanfaatan dan penggunaan DAK merupakan faktor yang penting guna meningkatkan pembangunan daerah itu sendiri yang akan berdampak pada pembangunan nasional.

Pemerintah kabupaten/kota menyediakan pelayanan publik yang bersumber dari pengalokasian DAK melalui APBN dan digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang bersifat khusus. Tujuan dari pengalokasian DAK adalah untuk meminimalkan kesenjangan pelayanan publik antara satu daerah dengan daerah lainnya. DAK juga memiliki peran dalam peningkatan pembiayaan belanja pemerintah melalui belanja modal pemerintah daerah yang akan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Irwanti (2014) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap IPM. Lugastro (2013) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap IPM. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis penelitian yang dihasilkan adalah sebagai berikut.

H<sub>3</sub>: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif pada Indeks Pembangunan Manusia

Dana Bagi Hasil adalah salah satu bagian dari dana perimbangan yang pengalokasiannya ditujukan untuk pemerintah daerah. Sumber DBH yaitu pendapatan APBN yang dilihat dari potensi masing-masing daerah berdasarkan presentase. DBH

digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara tingkat pemerintahan dengan cara meratakan kemampuan fiskal antar pemerintah daerah guna memacu belanja daerah dalam membiayai kegiatan-kegiatan yang berdampak pada pembangunan nasional, pencapaian infrastruktur publik, dan memacu pendapatan daerah. Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lugastro (2013) menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis penelitian yang dihasilkan adalah sebagai berikut.

H<sub>4</sub>: Dana Bagi Hasil berpengaruh positif pada Indeks Pembangunan Manusia

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Menurut Sugiyono (2010:13), pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian berbentuk asosiatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih (Rahyuda dkk., 2004:17).

Lokasi atau wilayah penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Obyek penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun anggaran 2009-2013 dan tabel Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2009-2013.

Variabel dependen/terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2010:59). Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia.

Variabel independen/bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen/terikat (Sugiyono, 2010:59). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah ( $X_1$ ), Dana Alokasi Umum ( $X_2$ ), Dana Alokasi Khusus ( $X_3$ ), dan Dana Bagi Hasil ( $X_4$ ).

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dan kualitatif yang diperoleh melalui sumber data sekunder. Rahyuda dkk. (2004:18) menyatakan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan dengan jalan memberi skor, sedangkan data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, gambar. Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD dan tabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2009-2013, sedangkan data kualitatif mencakup beberapa penelitian terdahulu yang dapat mendukung hasil analisis.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh oleh peneliti melalui orang lain atau dokumen. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dokumen-dokumen yang terdapat pada Biro Keuangan Provinsi Bali seperti Laporan Realisasi APBD tahun anggaran 2009-2013 dan tabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2009-2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.

Populasi merupakan suatu wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010:115). Sementara sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2010:116). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali periode 2009-2013 dan tabel Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali periode 2009-2013.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh anggota populasi yakni Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali dan tabel Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali periode 2009-2013 yang terdiri dari 8 Kabupaten dan 1 Kota Madya dalam kurun waktu 5 tahun (2009-2013). Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2010:122).

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi non perilaku berupa studi dokumentasi. Metode pengumpulan data dengan cara ini dilakukan dengan meneliti dan memanfaatkan data atau dokumen yang dihasilkan oleh pihak-pihak lain (Rahyuda, 2004:77), seperti dengan cara mencatat, mengutip, serta mengumpulkan data dari dokumen yang terdapat pada Biro Keuangan Provinsi Bali, Badan Pusat Statistik Provinsi Bali serta hasil-hasil penelitian dan buku-buku literatur untuk menghasilkan argumentasi yang mendukung hasil analisis yang didapat.

Analisis regresi linier berganda merupakan model statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh satu atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Model analisis regresi linier berganda ditunjukkan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

- Y = Indeks Pembangunan Manusia
- a = Bilangan Konstan
- $\beta_1$  = Koefisien Regresi Rasio PAD terhadap BM
- $\beta_2$  = Koefisien Regresi Rasio DAU terhadap BM
- $\beta_3$  = Koefisien Regresi Rasio DAK terhadap BM
- $\beta_4$  = Koefisien Regresi Rasio DBH terhadap BM
- $X_1$  = Rasio PAD terhadap BM
- $X_2$  = Rasio DAU terhadap BM
- $X_3$  = Rasio DAK terhadap BM
- $X_4$  = Rasio DBH terhadap BM
- e = *error*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk menguji besarnya nilai minimum, maksimum, mean, dan simpangan baku (*Standard Deviation*) dengan N merupakan banyaknya amatan penelitian. Hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel 6.

**Tabel 6.**  
**Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

	<b>N</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Mean</b>	<b>Std. Deviation</b>
PAD	45	20.02	704.19	157.1104	145.14144
DAU	45	5.76	865.75	397.4596	194.62132
DAK	45	.07	139.32	40.7782	27.35159
DBH	45	7.28	226.04	42.8491	39.49420
IPM	45	66.06	79.41	72.9700	3.17185

*Sumber:* data sekunder diolah, 2015

Rasio PAD terhadap BM yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali tertinggi sebesar 704.19, terendah sebesar 20.02 dengan rata-rata sebesar 157.1104. Rasio DAU terhadap BM yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali tertinggi sebesar 865.75, terendah sebesar 5.76 dengan rata-rata sebesar 397.4596. Rasio DAK terhadap BM yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali tertinggi sebesar 139.32, terendah sebesar 0.07 dengan rata-rata sebesar 40.7782. Rasio DBH terhadap BM yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali tertinggi sebesar 226.04, terendah sebesar 7.28 dengan rata-rata sebesar 42.8491. Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali mencapai IPM tertinggi sebesar 79.41, terendah sebesar 66.06 dengan rata-rata sebesar 72.9700.

**Tabel 7.**  
**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

<b>Model</b>		<b>Unstandardized Coefficients</b>		<b>Standardized Coefficients</b>		<b>Sig.</b>
		<b>B</b>	<b>Std. Error</b>	<b>Beta</b>	<b>t</b>	
1	(Constant)	71.838	1.291		55.638	.000
	PAD	.008	.004	.361	1.993	.053
	DAU	.002	.002	.136	.996	.325
	DAK	-.042	.017	-.360	-2.402	.021
	DBH	.017	.012	.207	1.344	.186

*Sumber:* data sekunder diolah, 2015

$$Y = 71,838 + 0,008 X_1 + 0,002 X_2 - 0,042 X_3 + 0,017 X_4 + e \dots \dots \dots (2)$$

Nilai konstan 71,838 artinya apabila variabel-variabel independen (PAD ( $X_1$ ), DAU ( $X_2$ ), DAK ( $X_3$ ), dan DBH ( $X_4$ )) diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai Y (IPM) adalah sebesar 71,838 satuan. Nilai koefisien regresi PAD ( $X_1$ ) = 0,008 artinya apabila PAD ( $X_1$ ) naik sebesar satu satuan, sementara DAU ( $X_2$ ), DAK ( $X_3$ ), dan DBH ( $X_4$ ) diasumsikan tetap, maka IPM (Y) akan meningkat sebesar 0,008 satuan. Nilai koefisien regresi DAU ( $X_2$ ) = 0,002 artinya apabila DAU ( $X_2$ ) naik sebesar satu satuan, sementara PAD ( $X_1$ ), DAK ( $X_3$ ), dan DBH ( $X_4$ ) diasumsikan tetap, maka IPM (Y) akan meningkat sebesar 0,002 satuan. Nilai koefisien regresi DAK ( $X_3$ ) = -0,042 artinya apabila DAK ( $X_3$ ) naik sebesar satu satuan, sementara PAD ( $X_1$ ), DAU ( $X_2$ ), dan DBH ( $X_4$ ) diasumsikan tetap, maka IPM (Y) akan menurun sebesar 0,042 satuan. Nilai koefisien regresi DBH ( $X_4$ ) = 0,017 artinya apabila DBH ( $X_4$ ) naik sebesar satu satuan, sementara PAD ( $X_1$ ), DAU ( $X_2$ ), dan DAK ( $X_3$ ) diasumsikan tetap, maka IPM (Y) akan meningkat sebesar 0,017 satuan.

Hasil uji pengaruh PAD atau rasio PAD/BM ( $X_1$ ) pada IPM (Y) diperoleh *p-value* sebesar 0,053 lebih besar dari  $\alpha = 5\%$ . Hal ini berarti bahwa PAD berpengaruh tidak signifikan pada IPM. Nilai koefisien regresi PAD ( $X_1$ ) pada tabel 4.10 menunjukkan adanya pengaruh positif PAD pada IPM atau dengan kata lain  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Hasil ini berarti bahwa rasio PAD/BM tidak mempengaruhi IPM. Artinya kemampuan PAD dalam membiayai Belanja Modal tidak

mempengaruhi capaian IPM. Hasil penelitian ini tidak berhasil membuktikan penilitan sebelumnya yang dilakukan oleh Ardiansyah dkk. (2014). Hal ini disebabkan karena PAD lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja pegawai dan belanja langsung lainnya daripada membiayai belanja modal yang akan berdampak pada pembangunan manusia. Penggunaan PAD oleh pemerintah seharusnya membuat kemampuan daerah dalam membiayai belanja modal menjadi lebih besar demi menunjang sarana dan prasarana publik seperti sarana penunjang kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum yang akan lebih berdampak pada kesejahteraan hidup masyarakat. Pemerintah daerah seharusnya lebih bijak dalam mengalokasikan pengeluaran daerah terutama belanja modal agar kepentingan publik dapat terpenuhi serta pemerintah daerah diharapkan dapat terus menggali potensi-potensi PAD yang terdapat di daerahnya masing-masing guna memperkecil ketergantungan dengan pemerintah pusat dan untuk meningkatkan capaian IPM dimasa mendatang.

Hasil uji pengaruh DAU atau rasio DAU/BM ( $X_2$ ) pada IPM (Y) diperoleh *p-value* sebesar 0,325 lebih besar dari  $\alpha = 5\%$ . Hal ini berarti bahwa DAU berpengaruh tidak signifikan pada IPM. Nilai koefisien regresi DAU ( $X_2$ ) pada tabel 4.10 menunjukkan adanya pengaruh positif DAU pada IPM atau dengan kata lain  $H_0$  diterima dan  $H_2$  ditolak. Hasil ini berarti bahwa rasio DAU/BM tidak mempengaruhi IPM. Artinya kemampuan DAU dalam membiayai Belanja Modal tidak mempengaruhi capaian IPM. Hasil penelitian ini tidak berhasil membuktikan penilitan sebelumnya yang dilakukan oleh Irwanti (2014). Hal ini disebabkan karena

DAU digunakan untuk belanja pegawai bukan untuk belanja modal karena komponen utama yang mendominasi DAU merupakan komponen alokasi dasar, dimana alokasi dasar merupakan alokasi anggaran yang digunakan untuk belanja pegawai. Namun dalam hal ini belanja pegawai dapat mempengaruhi IPM melalui pengalokasian yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai belanja pegawai berupa belanja tenaga kesehatan dan pengajar. Ini membuktikan bahwa DAU mampu memberikan kontribusi terhadap kinerja perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat walaupun dengan kontribusi yang kecil. Tolak ukur dari keberhasilan penggunaan DAU sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah daerah dapat mengelola dengan bijak sehingga sesuai dengan skala prioritas kebutuhan dari tiap-tiap daerah.

Hasil uji pengaruh DAK atau rasio DAK/BM ( $X_3$ ) pada IPM (Y) diperoleh *p-value* sebesar 0,021 lebih kecil dari  $\alpha = 5\%$ . Hal ini berarti bahwa DAK berpengaruh signifikan pada IPM. Nilai koefisien regresi DAK ( $X_3$ ) pada tabel 4.10 menunjukkan adanya pengaruh negatif DAK pada IPM atau dengan kata lain  $H_0$  diterima dan  $H_3$  ditolak. Hasil ini berarti bahwa rasio DAK/BM berpengaruh negatif dan signifikan pada IPM. Apabila semakin besar DAK membiayai Belanja Modal, maka capaian IPM dianggap rendah, sebaliknya semakin kecil DAK membiayai Belanja Modal, maka capaian IPM dianggap tinggi. Hasil penelitian ini tidak berhasil membuktikan penilitan sebelumnya yang dilakukan oleh Irwanti (2014), Justru sebaliknya, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah dkk. (2014). Hal ini membuktikan DAK kurang memberikan pengaruh yang kuat pada kinerja perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam teori DAK

ditujukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah yang bersifat khusus (kesehatan, pendidikan, pertanian, pekerjaan umum, prasarana pemerintahan, kelautan dan perikanan, dan lingkungan hidup) yang bertujuan untuk meminimalkan ketidakmerataan infrastruktur publik antara satu daerah dengan daerah lainnya. Sangat sulit dalam melihat pengaruh DAK pada kesejahteraan masyarakat karena sebagian besar bidang mengarah pada investasi yang pengaruhnya akan terlihat pada jangka waktu yang panjang.

Hasil uji pengaruh DBH atau rasio DBH/BM ( $X_4$ ) pada IPM ( $Y$ ) diperoleh *p-value* sebesar 0,186 lebih besar dari  $\alpha = 5\%$ . Hal ini berarti bahwa DBH berpengaruh tidak signifikan pada IPM. Nilai koefisien regresi DBH ( $X_4$ ) pada tabel 4.10 menunjukkan adanya pengaruh positif DBH pada IPM atau dengan kata lain  $H_0$  diterima dan  $H_4$  ditolak. Hasil ini berarti bahwa rasio DBH/BM tidak mempengaruhi IPM. Artinya kemampuan DBH dalam membiayai Belanja Modal tidak mempengaruhi capaian IPM. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lugastro (2013). Hal ini disebabkan karena pengelolaan dan penggunaan DBH merupakan wewenang dari pemerintah daerah. Namun terdapat beberapa komponen yang penggunaannya ditentukan oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah tidak leluasa dalam hal penggunaan DBH untuk kesejahteraan masyarakat yang akan menyebabkan pengalokasian DBH kurang berdampak secara signifikan pada IPM. Peningkatan DBH seharusnya berkontribusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika pemerintah daerah lebih banyak

menggunakan DBH untuk mendanai kebutuhan masyarakat melalui alokasi belanja modal demi menunjang sarana dan prasarana publik yang dapat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Dana Alokasi Umum tidak mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Dana Bagi Hasil tidak mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Berdasarkan simpulan di atas, saran yang dapat direkomendasikan adalah Pemerintah daerah diharapkan melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari capaian IPM yang diperoleh. Diharapkan IPM kabupaten/kota di Provinsi Bali terus meningkat sehingga mencapai kategori sangat tinggi. Pemerintah daerah diharapkan lebih fokus dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli daerah dengan menggali potensi-potensi Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja pembangunan manusia. Pemerintah daerah diharapkan lebih bijak dan cermat dalam menggunakan alokasi PAD dan Dana Perimbangan melalui alokasi belanja modal dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan perekonomian demi meningkatkan capaian IPM. Bagi peneliti

selanjutnya, diharapkan mampu melakukan pengembangan penelitian dengan menambahkan tahun penelitian dengan menggunakan data yang terbaru, nilai koefisien determinasinya yang hanya 39,9% menunjukkan bahwa masih terdapat variabel independen lainnya yang masih bisa digali, serta menambahkan rasio belanja pemerintah lainnya yang berhubungan dengan komponen IPM seperti belanja pegawai yang berdampak pada gaji guru dan tenaga kesehatan.

## REFERENSI

- Ardiansyah, Vitalis Ari, dan Widiyaningsih. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*. Mataram.
- BAPPENAS. 2003. Peta Kemampuan Keuangan Propinsi Dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan Atas Kinerja PAD dan Upaya yang dilakukan Daerah. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap pengalokasian belanja modal. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar.
- Irwanti, Eva. 2014. Analisis Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi di Papua Barat Periode 2008-2012. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Universitas Hasanuddin Makassar.
- Lugastro, Decta Pitron. 2013. Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 1(2), h: 01-19.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah. *Makalah. Jurnal Ekonomi Rakyat*. Artikel Th. 1 No. 4 Juni 2002.
- Rahyuda, I Ketut, IGW Murjana Yasa dan I Nyoman Yuliarmi. 2004. Metodologi Penelitian. Denpasar: Universitas Udayana Press.
- Setyowati, Lilis dan Yohana Kus Suparwati. 2012. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, dan PAD pada Indeks Pembangunan Manusia dengan

Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se- Jawa Tengah . *Prestasi*, 9(1), Juni 2012

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Wertianti, I G A Gede. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi pada Belanja Modal Dengan PAD dan DAU Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 4.3, pp: 567-584.

Wijaya, Toni. 2007. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pembangunan pada Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta". *Modus* 19(2).

Zebua, Willman Fogati. 2014. Pengaruh Alokasi Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2013). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.